



Literasi Digital sebagai Upaya Mengurangi Disinformasi di Media Sosial

Neni Sriwahyuni

Sekolah Tinggi Agama Islam YPI Al Ikhlas Painan, Indonesia

Email: nenisriwahyuni@gmail.com

Open Access

This article is freely available online under the CC BY 4.0 license.

Riwayat Artikel

Disubmit: 2026-07-08

Direvisi: 2026-07-11

Diterima: 2026-07-13

Dipublis: 2026-07-13

Keywords

Digital literacy; disinformation; social media; artificial intelligence; information resilience.

Kata Kunci

literasi digital; disinformasi; media sosial; kecerdasan buatan; ketahanan informasi.

ABSTRACT

The rapid growth of social media has significantly transformed the way information is created, shared, and consumed. While digital platforms provide broad access to information, they also facilitate the widespread dissemination of disinformation, which can influence public opinion, social stability, and decision-making processes. These challenges have become more complex with the emergence of Artificial Intelligence (AI), enabling the rapid production of highly realistic digital content. This study aims to analyze the role of digital literacy as a strategy for reducing disinformation on social media. A qualitative approach was employed using the Systematic Literature Review (SLR) method by examining peer-reviewed journal articles, books, and official reports related to digital literacy, social media, and disinformation. The findings reveal that digital literacy plays a crucial role in enhancing individuals' ability to access, evaluate, verify, and responsibly use digital information. Furthermore, its effectiveness depends on collaboration among governments, educational institutions, digital platforms, mass media, and communities in fostering a healthy digital information ecosystem. Strengthening critical thinking, fact-checking skills, digital ethics, digital security, and AI literacy is essential for improving information resilience in the digital era. Therefore, digital literacy should be viewed not merely as a technological competence but as a comprehensive preventive strategy to mitigate disinformation and promote a more reliable, critical, and sustainable digital information environment.

ABSTRAK

Perkembangan media sosial yang semakin pesat telah memberikan kemudahan dalam penyebaran informasi, tetapi juga meningkatkan risiko penyebaran disinformasi yang dapat memengaruhi opini publik, stabilitas sosial, dan kualitas pengambilan keputusan masyarakat. Kondisi ini semakin kompleks dengan hadirnya teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) yang memungkinkan produksi konten digital secara cepat dan realistis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran literasi digital sebagai strategi dalam mengurangi disinformasi di media sosial. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Systematic Literature Review (SLR) melalui analisis berbagai artikel ilmiah bereputasi, buku, dan dokumen

resmi yang relevan mengenai literasi digital, media sosial, dan disinformasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa literasi digital memiliki peran strategis dalam meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengakses, mengevaluasi, memverifikasi, serta memanfaatkan informasi secara kritis, etis, dan bertanggung jawab. Selain itu, efektivitas literasi digital dipengaruhi oleh kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, platform digital, media massa, dan masyarakat dalam membangun ekosistem informasi yang sehat. Penguatan kompetensi berpikir kritis, fact-checking, etika digital, keamanan digital, serta AI literacy menjadi faktor penting dalam membangun ketahanan informasi (*information resilience*) di era transformasi digital. Dengan demikian, literasi digital tidak hanya berfungsi sebagai keterampilan teknologi, tetapi juga sebagai strategi preventif yang berkontribusi terhadap pengurangan disinformasi dan penguatan kualitas ruang digital di Indonesia.

1. PENDAHULUAN

Transformasi digital telah mengubah pola komunikasi masyarakat secara fundamental melalui meningkatnya penggunaan internet dan media sosial sebagai sumber utama informasi. Kemudahan akses, kecepatan distribusi, dan rendahnya hambatan dalam memproduksi konten menjadikan media sosial sebagai ruang publik digital yang sangat dinamis. Menurut DataReportal (2025), Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah pengguna internet dan media sosial terbesar di dunia, di mana sebagian besar masyarakat mengakses informasi harian melalui platform seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, dan X (Twitter). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa media sosial tidak lagi sekadar menjadi sarana komunikasi, tetapi telah berkembang menjadi ekosistem utama dalam pembentukan opini publik, penyebaran pengetahuan, hingga proses pengambilan keputusan masyarakat.

Di balik berbagai manfaat tersebut, media sosial juga menghadirkan tantangan serius berupa meningkatnya penyebaran misinformasi, disinformasi, dan malinformasi. Wardle dan Derakhshan (2017) membedakan ketiga konsep tersebut berdasarkan unsur kesengajaan dan tujuan penyebaran informasi. Misinformasi merujuk pada informasi yang salah tetapi disebarkan tanpa niat menyesatkan, sedangkan disinformasi merupakan informasi yang sengaja diproduksi dan disebarluaskan untuk memengaruhi persepsi, opini, maupun perilaku masyarakat. Adapun malinformasi adalah informasi yang benar, tetapi digunakan secara tidak tepat untuk merugikan individu atau kelompok tertentu. Dalam konteks media sosial, disinformasi menjadi ancaman yang paling kompleks karena memanfaatkan karakteristik platform digital yang memungkinkan penyebaran informasi berlangsung secara masif dan sangat cepat.

Fenomena disinformasi semakin mengkhawatirkan karena didukung oleh algoritma media sosial yang cenderung memprioritaskan konten dengan tingkat interaksi tinggi dibandingkan akurasi informasi. Penelitian yang dilakukan oleh Vosoughi, Roy, dan Aral (2018) menemukan bahwa berita palsu menyebar lebih cepat, lebih luas, dan menjangkau lebih banyak pengguna dibandingkan berita yang telah diverifikasi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa karakteristik psikologis pengguna, seperti kecenderungan terhadap informasi yang mengejutkan atau emosional, menjadi faktor yang mempercepat viralitas disinformasi. Dengan demikian, tantangan utama dalam era digital bukan lagi terbatas pada akses terhadap informasi, melainkan kemampuan masyarakat dalam membedakan informasi yang kredibel dari informasi yang manipulatif.

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*), khususnya *Generative AI*, semakin memperumit persoalan disinformasi. Teknologi ini memungkinkan produksi teks, gambar, suara, dan video sintesis yang memiliki tingkat kemiripan tinggi dengan kondisi nyata sehingga sulit dibedakan oleh masyarakat umum. UNESCO (2023) menegaskan bahwa perkembangan AI generatif membawa peluang besar bagi inovasi digital, tetapi pada saat yang sama meningkatkan risiko penyebaran konten manipulatif seperti *deepfake*, informasi palsu otomatis, dan propaganda digital. Oleh karena itu, kemampuan masyarakat dalam mengevaluasi kredibilitas informasi menjadi semakin penting pada era transformasi digital.

Indonesia merupakan salah satu negara yang menghadapi tantangan signifikan terkait penyebaran disinformasi. Berbagai isu strategis, mulai dari kesehatan, politik, ekonomi, bencana, hingga konflik sosial, kerap diwarnai oleh beredarnya informasi yang belum terverifikasi. Laporan Kementerian Komunikasi dan

Digital Republik Indonesia menunjukkan bahwa pemerintah secara rutin melakukan identifikasi dan penanganan terhadap ribuan konten hoaks setiap tahunnya melalui berbagai kanal digital. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendekatan berbasis regulasi semata belum cukup untuk mengatasi persoalan disinformasi tanpa diimbangi dengan peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola informasi secara kritis.

Salah satu pendekatan yang banyak direkomendasikan oleh berbagai organisasi internasional adalah penguatan literasi digital. UNESCO (2018) mendefinisikan literasi digital sebagai kemampuan individu dalam mengakses, memahami, mengevaluasi, menciptakan, dan menggunakan informasi digital secara efektif, kritis, etis, dan bertanggung jawab. Literasi digital tidak hanya mencakup keterampilan teknis dalam mengoperasikan perangkat digital, tetapi juga melibatkan kemampuan berpikir kritis (*critical thinking*), literasi informasi (*information literacy*), komunikasi digital, keamanan digital, serta kesadaran etika dalam memanfaatkan teknologi informasi.

Konsep literasi digital terus berkembang seiring meningkatnya kompleksitas ekosistem informasi digital. Eshet (2004) menjelaskan bahwa literasi digital merupakan kombinasi antara keterampilan teknis, kemampuan kognitif, serta kemampuan sosial yang memungkinkan seseorang memahami dan mengevaluasi informasi secara tepat. Sementara itu, Ng (2012) mengemukakan bahwa literasi digital mencakup tiga dimensi utama, yaitu dimensi teknis, kognitif, dan sosial-emosional. Ketiga dimensi tersebut saling melengkapi dalam membentuk kemampuan individu untuk menggunakan teknologi digital secara produktif sekaligus bertanggung jawab.

Dalam konteks penyebaran disinformasi, literasi digital memiliki peran strategis sebagai mekanisme perlindungan (*protective factor*) terhadap manipulasi informasi. Individu yang memiliki tingkat literasi digital tinggi cenderung melakukan verifikasi sumber informasi, membandingkan informasi dari berbagai media, memahami konteks pemberitaan, serta tidak mudah membagikan informasi sebelum memastikan validitasnya. Guess, Lerner, Lyons, Montgomery, Nyhan, Reifler, dan Sircar (2020) menunjukkan bahwa intervensi sederhana berupa pengingat mengenai pentingnya akurasi informasi (*accuracy nudge*) mampu meningkatkan kehati-hatian pengguna media sosial sebelum menyebarkan suatu informasi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran kritis dapat menjadi strategi efektif dalam mengurangi penyebaran disinformasi.

Selain itu, Roozenbeek et al. (2022) memperkenalkan pendekatan *prebunking*, yaitu strategi edukasi yang bertujuan membangun ketahanan masyarakat terhadap teknik manipulasi informasi sebelum individu terpapar disinformasi. Pendekatan ini terbukti mampu meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengenali pola propaganda, manipulasi emosi, penggunaan bahasa provokatif, serta berbagai bentuk distorsi informasi yang sering ditemukan pada media sosial. Dengan demikian, literasi digital tidak hanya bersifat reaktif melalui pemeriksaan fakta (*fact-checking*), tetapi juga bersifat preventif dengan membangun ketahanan kognitif masyarakat.

Di Indonesia, penguatan literasi digital juga menjadi bagian dari agenda transformasi digital nasional. Kementerian Komunikasi dan Digital bersama berbagai perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, komunitas digital, dan perusahaan teknologi telah melaksanakan berbagai program edukasi literasi digital. Meskipun demikian, efektivitas implementasi program tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti kesenjangan literasi antarwilayah, rendahnya budaya membaca, dominasi konsumsi konten audiovisual berdurasi pendek, rendahnya kemampuan evaluasi sumber informasi, serta pesatnya perkembangan teknologi AI generatif yang menghasilkan konten semakin sulit diverifikasi. Tantangan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan literasi digital harus dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji hubungan antara literasi digital dan penyebaran disinformasi, namun sebagian besar masih berfokus pada aspek perilaku pengguna atau efektivitas program literasi digital secara parsial. Sementara itu, kajian yang mengintegrasikan perkembangan teknologi kecerdasan buatan, karakteristik algoritma media sosial, strategi *prebunking*, serta kolaborasi multipihak

dalam membangun ketahanan masyarakat terhadap disinformasi masih relatif terbatas, khususnya dalam konteks Indonesia. Kesenjangan tersebut menunjukkan perlunya kajian yang lebih komprehensif mengenai literasi digital sebagai strategi multidimensional dalam mengurangi disinformasi pada ekosistem media sosial yang terus berkembang.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran literasi digital sebagai upaya untuk mengurangi disinformasi di media sosial melalui pendekatan studi kepustakaan. Pembahasan difokuskan pada perkembangan konsep literasi digital, karakteristik disinformasi di media sosial, strategi penguatan literasi digital, serta implikasi kebijakan bagi pemerintah, lembaga pendidikan, platform digital, dan masyarakat. Hasil kajian diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan kebijakan literasi digital sekaligus menjadi referensi akademik dalam memperkuat ketahanan masyarakat terhadap disinformasi di era transformasi digital dan kecerdasan buatan.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Systematic Literature Review (SLR) untuk menganalisis peran literasi digital dalam mengurangi disinformasi di media sosial. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti melakukan sintesis secara sistematis terhadap berbagai hasil penelitian yang telah dipublikasikan, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai perkembangan konsep, temuan empiris, serta strategi implementasi literasi digital dalam menghadapi disinformasi pada era digital. Pendekatan ini juga relevan untuk mengidentifikasi kesenjangan penelitian (*research gap*) sekaligus merumuskan implikasi konseptual dan praktis berdasarkan bukti ilmiah yang tersedia.

Proses penelusuran literatur dilakukan pada bulan Juni–Juli 2026 melalui beberapa basis data ilmiah bereputasi, yaitu Scopus, Web of Science, ScienceDirect, SpringerLink, Taylor & Francis Online, Google Scholar, serta dokumen resmi dari UNESCO, OECD, World Economic Forum, United Nations, dan Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Kata kunci yang digunakan meliputi *digital literacy*, *media and information literacy*, *digital competence*, *misinformation*, *disinformation*, *fake news*, *social media*, *artificial intelligence*, *fact-checking*, dan *prebunking*. Penelusuran dilakukan menggunakan kombinasi operator Boolean (*AND* dan *OR*) untuk memperoleh literatur yang relevan dengan fokus penelitian.

Seleksi literatur dilakukan berdasarkan beberapa kriteria inklusi, yaitu: (1) artikel dipublikasikan pada periode 2018–2025, dengan prioritas pada publikasi 2021–2025; (2) diterbitkan dalam jurnal yang telah melalui proses peer review atau berasal dari lembaga internasional bereputasi; (3) membahas literasi digital, media sosial, disinformasi, atau strategi penguatan ketahanan informasi masyarakat; dan (4) tersedia dalam teks lengkap. Sebaliknya, artikel yang tidak memiliki relevansi langsung dengan fokus penelitian, dipublikasikan pada media nonilmiah, atau tidak menyediakan informasi metodologis yang memadai tidak disertakan dalam proses analisis.

Data dianalisis menggunakan analisis tematik (*thematic analysis*) sebagaimana dikembangkan oleh Braun dan Clarke (2006). Analisis diawali dengan membaca secara menyeluruh setiap artikel, kemudian mengidentifikasi tema-tema utama yang berulang, mengelompokkan hasil penelitian berdasarkan kesamaan konsep, membandingkan temuan antarpelitian, serta menyusun sintesis untuk menjelaskan hubungan antara literasi digital dan upaya pengurangan disinformasi di media sosial. Hasil sintesis selanjutnya diinterpretasikan secara kritis untuk mengidentifikasi pola, tantangan, strategi, dan implikasi kebijakan yang relevan dalam konteks masyarakat digital Indonesia.

Untuk menjaga kualitas kajian, penelitian ini menerapkan prinsip kredibilitas sumber, konsistensi analisis, dan triangulasi referensi, yaitu dengan membandingkan temuan dari berbagai

artikel ilmiah dan dokumen kebijakan internasional maupun nasional. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menghasilkan analisis yang komprehensif, objektif, dan memiliki dasar akademik yang kuat sebagai landasan dalam merumuskan rekomendasi mengenai penguatan literasi digital sebagai strategi untuk mengurangi disinformasi di media sosial.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Disinformasi sebagai Tantangan dalam Ekosistem Media Sosial

Perkembangan media sosial telah mengubah pola produksi dan distribusi informasi secara signifikan. Kemudahan setiap pengguna dalam membuat, membagikan, dan mengomentari informasi menjadikan media sosial sebagai ruang komunikasi yang sangat dinamis. Namun, karakteristik tersebut juga meningkatkan risiko penyebaran disinformasi, yaitu informasi yang sengaja diproduksi atau dimanipulasi untuk menyesatkan publik (Wardle & Derakhshan, 2017). Berbeda dengan media konvensional yang menerapkan proses penyuntingan, informasi di media sosial dapat menyebar secara instan tanpa melalui mekanisme verifikasi yang memadai.

Penyebaran disinformasi tidak hanya dipengaruhi oleh perilaku pengguna, tetapi juga oleh sistem algoritma media sosial yang mengutamakan tingkat keterlibatan (*engagement*) dibandingkan dengan akurasi informasi. Algoritma cenderung merekomendasikan konten yang mampu menarik perhatian, memicu emosi, atau menimbulkan kontroversi, sehingga informasi yang sensasional lebih mudah menjadi viral dibandingkan informasi faktual (Cinelli et al., 2021). Kondisi ini diperkuat oleh fenomena *echo chamber* dan *filter bubble*, di mana pengguna lebih sering menerima informasi yang sesuai dengan pandangan mereka sehingga mempersempit paparan terhadap perspektif yang berbeda (Pariser, 2011).

Penelitian Vosoughi et al. (2018) menunjukkan bahwa berita palsu menyebar lebih cepat dan menjangkau lebih banyak pengguna dibandingkan dengan berita yang benar. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa karakteristik psikologis, seperti rasa penasaran, ketakutan, dan kemarahan, berkontribusi terhadap tingginya penyebaran disinformasi. Dalam konteks ini, persoalan utama bukan hanya banyaknya informasi yang beredar, tetapi rendahnya kemampuan masyarakat dalam mengevaluasi kredibilitas sumber informasi secara kritis.

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) semakin meningkatkan kompleksitas disinformasi. Teknologi *Generative AI* memungkinkan pembuatan teks, gambar, suara, dan video sintetis (*deepfake*) dengan kualitas yang sulit dibedakan dari konten asli. UNESCO (2023) menegaskan bahwa kemajuan AI memberikan manfaat besar bagi inovasi digital, tetapi juga membuka peluang baru bagi produksi dan penyebaran disinformasi secara lebih cepat dan masif. Oleh karena itu, tantangan utama masyarakat digital saat ini bukan hanya menghadapi volume informasi yang tinggi, tetapi juga meningkatnya kualitas manipulasi informasi.

Di Indonesia, tingginya penggunaan media sosial belum sepenuhnya diikuti oleh kemampuan literasi digital yang memadai. DataReportal (2025) menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia menghabiskan waktu lebih dari tiga jam per hari di media sosial, menjadikannya salah satu negara dengan tingkat penggunaan media sosial tertinggi di dunia. Sementara itu, berbagai laporan Kementerian Komunikasi dan Digital menunjukkan bahwa isu kesehatan, politik, ekonomi, dan bencana masih menjadi tema yang paling sering dimanfaatkan dalam penyebaran hoaks. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan akses digital belum secara otomatis meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memverifikasi informasi.

Berdasarkan sintesis berbagai penelitian, disinformasi merupakan persoalan multidimensional yang dipengaruhi oleh interaksi antara teknologi digital, algoritma platform, faktor psikologis, serta rendahnya literasi informasi masyarakat (UNESCO, 2021; OECD, 2021). Oleh karena itu, penanganan disinformasi tidak cukup hanya melalui regulasi atau moderasi konten, tetapi memerlukan penguatan kapasitas masyarakat agar mampu mengakses, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi secara kritis. Dalam konteks tersebut, literasi digital menjadi fondasi penting dalam membangun ketahanan masyarakat terhadap penyebaran disinformasi di media sosial.

Literasi Digital sebagai Strategi Mengurangi Disinformasi

Literasi digital telah berkembang dari sekadar kemampuan menggunakan perangkat teknologi menjadi kompetensi yang mencakup kemampuan mengakses, memahami, mengevaluasi, menciptakan, dan membagikan informasi secara kritis, etis, dan bertanggung jawab (UNESCO, 2018). Dalam konteks media sosial, literasi digital tidak hanya berfungsi meningkatkan keterampilan teknis pengguna, tetapi juga membangun kemampuan berpikir kritis terhadap berbagai informasi yang beredar. Kemampuan tersebut menjadi semakin penting mengingat karakteristik media sosial memungkinkan penyebaran informasi berlangsung sangat cepat tanpa melalui proses penyuntingan sebagaimana pada media konvensional.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa rendahnya literasi digital berkorelasi dengan meningkatnya kerentanan individu terhadap disinformasi. Individu yang memiliki kemampuan literasi digital rendah cenderung mempercayai informasi berdasarkan popularitas, jumlah interaksi, atau kesesuaian dengan keyakinan pribadi tanpa melakukan verifikasi terhadap sumber informasi. Sebaliknya, individu dengan literasi digital yang baik lebih mampu membandingkan informasi dari berbagai sumber, mengidentifikasi kredibilitas penulis, serta mengevaluasi bukti yang mendukung suatu informasi (Ng, 2012; UNESCO, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa literasi digital merupakan faktor protektif dalam menghadapi arus informasi yang semakin kompleks.

Kerangka Media and Information Literacy (MIL) yang dikembangkan UNESCO menempatkan kemampuan berpikir kritis sebagai inti dari literasi digital. Melalui pendekatan ini, masyarakat didorong untuk tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga menjadi pengguna digital yang mampu memahami bagaimana informasi diproduksi, didistribusikan, dan dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi, politik, maupun algoritma platform digital (UNESCO, 2021). Dengan demikian, literasi digital tidak hanya berorientasi pada aspek teknis, tetapi juga pada pembentukan kesadaran kritis terhadap ekosistem informasi digital.

Selain itu, kerangka DigComp 2.2 yang dikembangkan Komisi Eropa mengelompokkan kompetensi digital ke dalam lima domain utama, yaitu literasi informasi dan data, komunikasi dan kolaborasi, pembuatan konten digital, keamanan digital, serta pemecahan masalah (Vuorikari et al., 2022). Dari kelima domain tersebut, literasi informasi menjadi kompetensi yang paling relevan dalam mengurangi disinformasi karena menekankan kemampuan mencari, menyaring, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara bertanggung jawab. Kompetensi ini semakin penting pada era kecerdasan buatan ketika konten sintetis (*AI-generated content*) semakin sulit dibedakan dari informasi autentik.

Sejumlah penelitian empiris mendukung efektivitas literasi digital dalam mengurangi penyebaran disinformasi. Guess et al. (2020) menemukan bahwa intervensi sederhana berupa pengingat kepada pengguna untuk memperhatikan akurasi informasi sebelum membagikannya (*accuracy nudge*) mampu meningkatkan kualitas informasi yang dibagikan di media sosial.

Sementara itu, Roozenbeek et al. (2022) menunjukkan bahwa pendekatan prebunking, yaitu memberikan edukasi mengenai teknik manipulasi informasi sebelum masyarakat terpapar disinformasi, lebih efektif dalam membangun ketahanan informasi dibandingkan hanya mengandalkan *fact-checking* setelah informasi tersebar. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa upaya preventif melalui pendidikan literasi digital memiliki dampak yang lebih berkelanjutan dibandingkan pendekatan korektif.

Dalam konteks Indonesia, penguatan literasi digital telah menjadi bagian dari agenda transformasi digital nasional melalui berbagai program edukasi yang melibatkan pemerintah, perguruan tinggi, komunitas, dan sektor swasta. Namun, efektivitas program tersebut masih menghadapi tantangan berupa kesenjangan literasi antarwilayah, rendahnya budaya membaca, dominasi konsumsi konten audiovisual, serta pesatnya perkembangan teknologi AI generatif. Oleh karena itu, penguatan literasi digital perlu diarahkan pada pengembangan kemampuan berpikir kritis, verifikasi informasi, etika digital, serta pemahaman terhadap cara kerja algoritma media sosial sehingga masyarakat tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu menjadi warga digital (*digital citizens*) yang bertanggung jawab.

Berdasarkan sintesis literatur, dapat dipahami bahwa literasi digital merupakan strategi preventif yang memiliki kontribusi signifikan dalam mengurangi disinformasi. Efektivitasnya tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis menggunakan teknologi, tetapi juga oleh kemampuan kognitif untuk mengevaluasi informasi, memahami konteks komunikasi digital, serta mengambil keputusan berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, penguatan literasi digital perlu diposisikan sebagai investasi jangka panjang dalam membangun ketahanan informasi masyarakat di tengah perkembangan media sosial dan kecerdasan buatan yang semakin dinamis.

Peran Multiaktor dalam Penguatan Literasi Digital

Penguatan literasi digital dalam mengurangi disinformasi tidak dapat dibebankan kepada satu pihak saja, melainkan memerlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, platform digital, media massa, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat sebagai pengguna media sosial. Pendekatan kolaboratif ini dikenal sebagai *whole-of-society approach*, yaitu model tata kelola yang menempatkan seluruh pemangku kepentingan sebagai aktor yang memiliki tanggung jawab bersama dalam menjaga kualitas ekosistem informasi digital (United Nations, 2023).

Pemerintah memiliki peran strategis melalui penyusunan regulasi, penyediaan kebijakan literasi digital, serta penguatan infrastruktur pendidikan digital. Di Indonesia, berbagai program literasi digital yang diinisiasi oleh Kementerian Komunikasi dan Digital menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kompetensi digital masyarakat. Namun demikian, efektivitas kebijakan tidak hanya bergantung pada jumlah program yang dilaksanakan, tetapi juga pada kemampuan menjangkau kelompok masyarakat yang memiliki tingkat literasi digital rendah, khususnya di wilayah dengan keterbatasan akses informasi (OECD, 2021).

Lembaga pendidikan memiliki posisi penting dalam membangun budaya berpikir kritis sejak dini. Literasi digital tidak seharusnya dipahami sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri, melainkan diintegrasikan ke dalam proses pembelajaran melalui aktivitas analisis informasi, evaluasi sumber, serta penggunaan media digital secara etis. UNESCO (2021) menegaskan bahwa penguatan *Media and Information Literacy* perlu menjadi bagian dari kurikulum agar peserta didik memiliki kemampuan mengenali bias informasi, memahami cara kerja media digital, dan mengambil keputusan berdasarkan bukti yang valid.

Di sisi lain, platform media sosial juga memiliki tanggung jawab dalam menciptakan ekosistem informasi yang sehat. Pengembangan algoritma yang lebih transparan, peningkatan sistem moderasi konten, pelabelan terhadap konten yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (*AI-generated content*), serta kerja sama dengan lembaga pemeriksa fakta merupakan langkah yang dapat mengurangi penyebaran disinformasi (UNESCO, 2023). Meskipun demikian, moderasi konten tidak dapat menggantikan pentingnya peningkatan kapasitas pengguna dalam mengevaluasi informasi secara mandiri.

Berdasarkan sintesis literatur, efektivitas literasi digital akan meningkat apabila didukung oleh sinergi antarpemangku kepentingan. Kolaborasi tersebut memungkinkan terciptanya ekosistem digital yang tidak hanya berorientasi pada pengendalian informasi, tetapi juga pada penguatan kapasitas masyarakat sebagai warga digital yang kritis, adaptif, dan bertanggung jawab.

Implikasi Kebijakan dan Arah Penguatan Literasi Digital di Indonesia

Hasil kajian menunjukkan bahwa disinformasi merupakan persoalan yang terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi digital dan kecerdasan buatan. Oleh karena itu, kebijakan literasi digital perlu bergeser dari pendekatan yang bersifat reaktif menuju pendekatan preventif yang berorientasi pada pembangunan ketahanan informasi masyarakat (*information resilience*). Pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai aktor utama yang mampu mengenali, mengevaluasi, dan merespons informasi secara kritis sebelum informasi tersebut disebarluaskan (Roozenbeek et al., 2022).

Salah satu implikasi penting adalah perlunya pengembangan kompetensi literasi digital yang lebih komprehensif. Selain kemampuan mengakses dan menggunakan teknologi, masyarakat perlu dibekali keterampilan *fact-checking*, evaluasi sumber informasi, pengenalan manipulasi visual dan audio, serta pemahaman mengenai cara kerja algoritma media sosial dan teknologi AI. Dalam konteks ini, konsep literasi digital berkembang menuju AI literacy, yaitu kemampuan memahami proses produksi konten berbasis kecerdasan buatan serta dampaknya terhadap kualitas informasi publik (UNESCO, 2023).

Penguatan literasi digital juga perlu disesuaikan dengan karakteristik kelompok sasaran. Generasi muda memerlukan pendekatan berbasis pembelajaran digital yang interaktif, sedangkan masyarakat umum membutuhkan edukasi yang kontekstual melalui komunitas, media massa, dan organisasi masyarakat. Pendekatan yang bersifat seragam cenderung kurang efektif karena tingkat akses teknologi, latar belakang pendidikan, dan kemampuan digital masyarakat sangat beragam (OECD, 2021).

Selain itu, evaluasi terhadap program literasi digital perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan menggunakan indikator yang tidak hanya mengukur jumlah peserta pelatihan, tetapi juga perubahan perilaku digital masyarakat. Indikator seperti kemampuan memverifikasi informasi, penurunan kecenderungan menyebarkan hoaks, serta peningkatan kepercayaan terhadap sumber informasi yang kredibel dapat menjadi ukuran keberhasilan program literasi digital. Dengan demikian, kebijakan literasi digital tidak berhenti pada peningkatan kompetensi teknis, tetapi mampu membangun budaya digital yang kritis, etis, dan bertanggung jawab.

Secara keseluruhan, hasil kajian menunjukkan bahwa literasi digital merupakan investasi strategis dalam memperkuat ketahanan masyarakat terhadap disinformasi. Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial dan perkembangan kecerdasan buatan, keberhasilan penguatan literasi digital akan sangat ditentukan oleh kolaborasi lintas sektor, inovasi kebijakan,

serta integrasi pendidikan literasi digital ke dalam sistem pendidikan dan kehidupan sosial masyarakat.

Literatur yang dikaji menunjukkan bahwa disinformasi di media sosial merupakan tantangan yang semakin kompleks akibat interaksi antara algoritma platform, perilaku pengguna, dan perkembangan teknologi kecerdasan buatan. Penyebaran informasi yang cepat tanpa proses verifikasi meningkatkan risiko terbentuknya persepsi yang keliru, polarisasi sosial, serta menurunnya kepercayaan terhadap informasi yang kredibel. Kondisi tersebut menegaskan bahwa penanganan disinformasi tidak dapat hanya mengandalkan regulasi atau moderasi konten, tetapi memerlukan penguatan kapasitas masyarakat dalam mengevaluasi informasi secara kritis.

Kajian ini menegaskan bahwa literasi digital merupakan strategi preventif yang efektif dalam mengurangi penyebaran disinformasi. Literasi digital tidak lagi terbatas pada kemampuan mengoperasikan teknologi, tetapi mencakup kemampuan berpikir kritis, memverifikasi sumber informasi, memahami cara kerja algoritma media sosial, serta mengenali konten yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan. Efektivitas penguatan literasi digital akan semakin optimal apabila didukung oleh kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, platform digital, media massa, dan masyarakat dalam membangun ekosistem informasi yang sehat dan bertanggung jawab.

Ke depan, pengembangan literasi digital perlu diarahkan pada penguatan AI literacy dan information resilience sebagai bagian dari kompetensi masyarakat digital. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menguji secara empiris efektivitas berbagai model pendidikan literasi digital pada kelompok masyarakat yang berbeda, sehingga dapat diperoleh rekomendasi kebijakan yang lebih kontekstual dalam menghadapi dinamika disinformasi pada era transformasi digital.

4. KESIMPULAN

Literasi digital merupakan salah satu strategi yang paling efektif dalam mengurangi penyebaran disinformasi di media sosial pada era transformasi digital. Hasil kajian menunjukkan bahwa disinformasi tidak hanya dipengaruhi oleh rendahnya kemampuan individu dalam mengevaluasi informasi, tetapi juga oleh karakteristik algoritma media sosial, perkembangan teknologi kecerdasan buatan, serta tingginya intensitas penggunaan platform digital. Dalam konteks tersebut, literasi digital tidak lagi dimaknai sebatas kemampuan mengoperasikan teknologi, melainkan mencakup kemampuan berpikir kritis, memverifikasi kredibilitas sumber, memahami mekanisme penyebaran informasi, serta menggunakan media digital secara etis dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, penguatan literasi digital menjadi fondasi penting dalam membangun ketahanan masyarakat terhadap berbagai bentuk manipulasi informasi di ruang digital.

Keberhasilan penguatan literasi digital memerlukan kolaborasi yang berkelanjutan antara pemerintah, lembaga pendidikan, platform media sosial, media massa, organisasi masyarakat, dan pengguna sebagai bagian dari ekosistem digital. Pendekatan yang terintegrasi melalui penguatan kebijakan, pendidikan, inovasi teknologi, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan mampu menciptakan budaya digital yang lebih kritis, adaptif, dan bertanggung jawab. Ke depan, pengembangan literasi digital juga perlu mengakomodasi kompetensi baru, seperti AI literacy dan information resilience, agar masyarakat tidak hanya mampu memanfaatkan teknologi secara produktif, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengenali, menganalisis, dan merespons disinformasi secara tepat di tengah pesatnya perkembangan kecerdasan buatan dan media sosial. Dengan demikian, literasi digital tidak hanya berperan sebagai instrumen pendidikan, tetapi juga sebagai pilar strategis dalam memperkuat kualitas demokrasi, kepercayaan publik, dan ketahanan informasi di masyarakat digital.

PERNYATAAN

Kontribusi Penulis

Penulis berkontribusi penuh dalam seluruh tahapan penelitian, meliputi konseptualisasi penelitian, penyusunan metodologi, penelusuran dan seleksi literatur, analisis dan sintesis data, interpretasi hasil, penyusunan naskah, serta revisi dan finalisasi manuskrip.

Pendanaan

Penelitian ini tidak menerima pendanaan eksternal. Seluruh proses penelitian dan penyusunan manuskrip dilakukan secara mandiri oleh penulis.

Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan tidak memiliki konflik kepentingan, baik yang bersifat aktual, potensial, maupun yang dipersepsikan, yang dapat memengaruhi pelaksanaan penelitian, interpretasi hasil, atau proses publikasi artikel ini.

Persetujuan Etik

Penelitian ini tidak melibatkan partisipan manusia, hewan, wawancara, survei, atau pengumpulan data primer.

Ketersediaan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari publikasi ilmiah, buku akademik, dokumen pemerintah, dan laporan organisasi internasional yang tersedia melalui sumber-sumber publik dan basis data ilmiah. Seluruh sumber yang digunakan telah dicantumkan dalam daftar pustaka sehingga dapat ditelusuri dan diverifikasi oleh pembaca. Penelitian ini tidak menghasilkan dataset primer baru.

Ucapan Terima Kasih

Penulis tidak memiliki individu atau institusi lain yang perlu dicantumkan dalam bagian ucapan terima kasih. Seluruh proses penelitian dan penyusunan manuskrip dilakukan oleh penulis.

Pengungkapan Penggunaan Alat Berbantuan AI

Dalam penyusunan manuskrip, penulis menggunakan alat berbantuan kecerdasan artifisial (AI) secara terbatas untuk membantu penyuntingan bahasa, perbaikan struktur dan kejelasan tulisan, serta penyempurnaan redaksional. Seluruh isi, analisis, interpretasi, pemilihan sumber, dan kesimpulan telah ditinjau dan diverifikasi oleh penulis. Penulis tetap bertanggung jawab penuh atas keakuratan, integritas, dan isi akhir manuskrip.

DAFTAR PUSTAKA

- Braun, V., & Clarke, V. (2006). *Using thematic analysis in psychology*. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101.
- DataReportal. (2025). *Digital 2025: Indonesia*. <https://datareportal.com/reports/digital-2025-indonesia>
- Eshet, Y. (2004). Digital literacy: A conceptual framework for survival skills in the digital era. *Journal of Educational Multimedia and Hypermedia*, 13(1), 93–106.
- Guess, A. M., et al. (2020). *A digital media literacy intervention increases discernment between mainstream and false news in the United States and India*. PNAS.
- Guess, A. M., Lerner, M., Lyons, B., Montgomery, J. M., Nyhan, B., Reifler, J., & Sircar, N. (2020). A digital media literacy intervention increases discernment between mainstream and false news in the United States and India. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 117(27), 15536–15545.

- Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. (2025). *Laporan Penanganan Hoaks dan Disinformasi*. Jakarta: Komdigi.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2023). *Modul Literasi Digital*. Jakarta: Kominfo.
- Ng, W. (2012). Can we teach digital natives digital literacy? *Computers & Education*, 59(3), 1065–1078.
- Ng, W. (2012). *Can we teach digital natives digital literacy?* Computers & Education.
- OECD. (2021). *21st-Century Readers: Developing Literacy Skills in a Digital World*. OECD Publishing.
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., et al. (2021). *The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews*. *BMJ*, 372, n71.
- Roozenbeek, J., et al. (2022). *Psychological inoculation improves resilience against misinformation on social media*. *Science Advances*.
- Roozenbeek, J., van der Linden, S., Goldberg, B., Rathje, S., & Lewandowsky, S. (2022). Psychological inoculation improves resilience against misinformation on social media. *Science Advances*, 8(34), eabo5581.
- Snyder, H. (2019). *Literature review as a research methodology: An overview and guidelines*. *Journal of Business Research*, 104, 333–339.
- UNESCO. (2018). *A Global Framework of Reference on Digital Literacy Skills for Indicator 4.4.2*. UNESCO Institute for Statistics.
- UNESCO. (2018). *A Global Framework of Reference on Digital Literacy Skills*.
- UNESCO. (2021). *Media and Information Literacy: Policy and Strategy Guidelines*. UNESCO.
- UNESCO. (2023). *Guidance for Generative AI in Education and Research*. UNESCO.
- United Nations. (2023). *Our Common Agenda: Policy Brief 8—Information Integrity on Digital Platforms*. United Nations.
- Vosoughi, S., Roy, D., & Aral, S. (2018). The spread of true and false news online. *Science*, 359(6380), 1146–1151.
- Vuorikari, R., Kluzer, S., & Punie, Y. (2022). *DigComp 2.2: The Digital Competence Framework for Citizens*. Publications Office of the European Union.
- Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017). *Information Disorder: Toward an Interdisciplinary Framework for Research and Policy Making*. Council of Europe.
- World Economic Forum. (2024). *The Global Risks Report 2024*. World Economic Forum.